



Buletin

Parlementaria

Nomor 1031/I/X/2018 • Oktober 2018



Aplikasi DPR Now!

Salurkan Aspirasi Masyarakat



9 772614 339005

BPJS Ketenagakerjaan Perlu Tingkatkan Sosialisasi



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo foto bersama Pimpinan dan Anggota DPR RI usai memberi sambutan dalam acara "Sosialisasi dan Workshop pemanfaatan aplikasi DPR Now"

Foto: Ojji/jk

Aplikasi DPR Now! Salurkan Aspirasi Masyarakat

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo Indonesia mengatakan, Indonesia merupakan negara pertama di kawasan Asia Pasifik yang telah mendeklarasikan komitmennya dalam mewujudkan parlemen yang terbuka atau *Open Parliament*. Komitmen ini dideklarasikan pada tanggal 29 Agustus 2018 bertepatan dengan peringatan HUT ke-73 DPR RI di hadapan Pimpinan dan Anggota DPR RI, perwakilan kementerian, dan pimpinan lembaga negara maupun para duta besar para negara-negara sahabat.

Ini menjelaskan, implementasi parlemen yang terbuka atau *Open Parliament* ini diawali dengan diluncurkannya aplikasi DPR Now!. Aplikasi berbasis *mobile* yang dapat dioperasikan di *smartphone* ini, menjadi akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai DPR RI melalui cara yang paling sederhana. Baginya deklarasi *Open Parliament* menjadi cerminan keseriusan Indonesia di mata dunia dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis yang sejalan dengan parlemen modern.

Bamsuet, sapaan akrabnya itu menegaskan aplikasi DPR Now! tidak hanya berfungsi sebagai sarana dalam mendiseminasikan informasi kinerja DPR RI kepada masyarakat, melainkan juga sebagai sarana komunikasi yang mampu menghubungkan rakyat dengan wakilnya. Dan pada gilirannya, juga mampu menghubungkan para stake holders terkait, termasuk di dalamnya mitra kerja DPR RI dari jajaran eksekutif dalam merumuskan solusi atas persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

"Melalui aplikasi DPR Now!, masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dan pengaduannya serta memperoleh kepastian transparansi penanganan pengaduan yang mereka ajukan dan memantau kegiatan, kinerja dan capaian DPR RI dari mana saja dan kapan saja menggunakan *smartphone*," papar Bamsuet, saat menyampaikan sambutan pada forum Bako Humas DPR RI yang mengangkat tema "Sosialisasi dan Workshop Pemanfaatan Aplikasi DPR Now", di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/10).

Sosialisasi juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Agus Hermanto, Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, sejumlah pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, co-founder DPR Now! Sebastian Salang, Ketua Umum Bakohumas Rosarita Niken Widiastuti dan jajaran dan

praktisi Humas dari berbagai kementerian dan lembaga.

Legislator Partai Golkar ini mengatakan, di era digital informasi menyebar semakin pesat, sementara hoaks menjadi tantangan yang harus diwaspadai dengan penuh kesigapan. Teknologi informasi memiliki penetrasi yang mendalam terhadap keseharian masyarakat. Bamsuet mewanti-wanti, jangan sampai informasi yang tidak benar menjadi sebab pemecahan kesatuan bangsa Indonesia.

“Melalui aplikasi DPR Now! DPR RI mampu menyediakan sumber informasi utama yang dapat dijadikan acuan bagi masyarakat. Bukan hanya menyangkut kinerja DPR RI secara khusus, melainkan juga menyangkut kinerja para penyelenggara pemerintahan lainnya dalam kaitan mitra kerja dengan DPR RI,” jelas Bamsuet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menuturkan penggunaan aplikasi DPR Now! merupakan salah satu langkah yang dilakukan DPR RI dalam mewujudkan parlemen terbuka yang di dalamnya terdapat beberapa indikator, yaitu keterbukaan, pemanfaatan teknologi informasi dan fungsi representasi. Penerapan *open parliament* menjadi cerminan keseriusan Indonesia di mata dunia dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis.

“Dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, transparansi sebuah keniscayaan. Berjalannya roda pemerintahan harus senantiasa dapat dipantau dan diketahui oleh rakyat, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Transparansi bukan hanya menutup potensi terjadinya abuse of power, melainkan juga membuka ruang partisipasi bagi masyarakat untuk menjadi warga negara yang aktif. Atas dasar itulah DPR Now! diluncurkan,” terang Bamsuet.

Legislator dapil Jawa Tengah VII ini berharap kementerian/lembaga sebagai mitra kerja DPR RI juga dapat memanfaatkan aplikasi DPR Now!. Setiap kementerian/lembaga bisa menempatkan orang secara khusus untuk mengikuti perkembangan pengaduan di DPR Now!. Sebab, setiap pengaduan telah di cluster sesuai mitra DPR RI di setiap kementerian/lembaga.

“Diharapkan kelak aplikasi ini dapat terkoneksi dengan semua kementerian/lembaga, sehingga ke depan kita memiliki sistem terpadu dalam menanggapi aspirasi dan pengaduan masyarakat. Selain itu, aplikasi tersebut bisa menjadi bagian dari solusi atas beragam persoalan yang ada di tengah masyarakat,” pungkas Bamsuet.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, kepercayaan masyarakat akan tumbuh manakala diimbangi dengan pemenuhan informasi yang memadai. Ketersediaan informasi yang mampu menjawab rasa keingintahuan masyarakat akan memberikan pemahaman yang baik terhadap kementerian atau lembaga negara.

Indra menyampaikan, Kehumasan DPR RI senantiasa berupaya menjembatani komunikasi antara DPR RI dengan masyarakat, sehingga informasi kinerja DPR RI dapat terdiseminasi dengan baik pada publik, dan aspirasi masyarakat juga dapat tersalurkan sesuai dengan harapan para Anggota Dewan.

“Kepercayaan publik memiliki korelasi yang signifikan dengan citra sebuah kementerian atau lembaga negara. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu kementerian atau lembaga maka semakin positif pula citra kementerian dan lembaga tersebut,” ungkap Indra.

Ia juga melaporkan, Kehumasan DPR RI dalam pelaksanaannya dikoordinir oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Dalam rangka pelaksanaan fungsi kehumasan, Biro Pemberitaan Parlemen didukung oleh empat unit kerja di bawahnya, yaitu Bagian Humas, Bagian Media Cetak dan Media Sosial, Bagian TV dan Radio Parlemen, serta Bagian Penerbitan.

Di sisi lain, Ketua Umum Bako Humas Irjen Informasi Komunikasi Publik Kominfo Niken Widayastuti mengungkapkan, aplikasi DPR Now! sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui capaian kinerja dari DPR RI. Harapannya, ke depan kehadiran aplikasi DPR Now! ini dapat meningkatkan indeks demokrasi Indonesia menjadi kategori baik. Meskipun pada tahun 2017 telah mengalami peningkatan cukup signifikan, yaitu mencapai angka 72,11 persen dibanding tahun 2016 sebesar 70,29 persen.

“Kepada bapak dan ibu anggota Bako Humas, tentunya kita akan mendukung sepenuhnya mensosialisasikan aplikasi DPR Now!, demi informasi yang dapat diterima oleh masyarakat. Bako Humas memiliki berbagai kanal informasi, apakah itu *website* atau videotron, kemudian Satgas Medsos dan lain sebagainya,” imbuh Niken. ■ eko/sf



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si. (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

WK. PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Suciati, S.Sos (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Sofyan Efendi

SEKRETARIS REDAKSI
Hasri Mentari, Guntur Dewanto

ANGGOTA REDAKSI
Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH,
Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.I.Kom
Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske
Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko,
Ria Nur Mega, Taufan Syahrulli

REDAKTUR FOTO
Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER
Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana,
Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni,
Azka Restu Fadilah, Geraldio Opie

ADMINISTRASI
Luthfi Suci Nur 'Aini, Damar Maulana Taher

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: bag_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Eko Priyanto, S.E. (Plt. Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

PHOTOGRAFER ART
Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito

STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah,
Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom,

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI
Sjaefudin, S.Sos

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**



Foto: Anandika

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memberikan cenderamata kepada perwakilan Majelis Taklim Binaun Mukminat Bogor

Fadli Zon Terima Majelis Taklim Binaun Mukminat Bogor

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan Majelis Taklim Binaun Mukminat, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/10). Kedatangan rombongan yang sebagian besar ibu-ibu ini dalam rangka silaturahmi sekaligus bertatap muka dan tanya jawab atas masalah-masalah yang dihadapi ibu-ibu dari daerah pemilihan (dapil) Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam itu.

Sebelumnya, secara singkat Fadli Zon menjelaskan mengenai sistem dan mekanisme kerja DPR RI sebagai lembaga legislatif. Selain memiliki tugas pokok yakni penyusunan undang-undang, mengawasi pemerintah dan menetapkan APBN, DPR RI juga mempunyai tugas untuk menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. DPR RI juga mengkritisi kebijakan pemerintah terhadap kenaikan tarif listrik dan BBM.

Pertemuan berjalan cukup menarik, sebab ibu-ibu tersebut dengan antusias mengajukan pertanyaan tentang masalah-masalah aktual yang terjadi akhir-akhir ini. Diantaranya bagaimana menyikapi soal Islam Nusantara, penyelesaian guru-guru honorer, minimnya penyuluh agama yang diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), hingga permasalahan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Menanggapi hal itu, Fadli menjelaskan, terkait Islam Nusantara

banyak interpretasi yang menjadi polemik. Baginya, Islam ya Islam saja, mungkin istilah Nusantara bisa membingungkan seolah-olah ada varian baru, nanti ada Islam Thailand, Islam Philipina dan lainnya.

Menurutnya, hanya ada satu Islam, sebuah agama yang tujuannya untuk *rahmatat-lil-alamiin*. Ia yakin Islam Nusantara hanya segelintir orang yang menggagas. Hal itu tidak perlu disikapi.

“Islam itu universal, bisa diterima di mana-mana, sudah jalankan saja apa yang menurut kita benar dan tidak perlu lagi satu ajaran baru yang bisa menimbulkan polemik. Kecuali memang aliran sesat yang sudah dinyatakan sesat oleh MUI itu harus kita tentang, karena bisa menimbulkan kerawanan sosial,” kata legislator Partai Gerindra itu.

Sedangkan menanggapi lapangan kerja yang sulit dan pabrik yang merekayasa kontrak kerja sehingga merugikan pekerja, Fadli menegaskan hal itu tidak boleh dilakukan. Ia mengakui banyak berhubungan dengan kaum buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), selalu konsisten memperjuangkan upah layak.

“Kalau ada hal-hal seperti ini bisa dilaporkan ke serikat pekerja dan instansi terkait, sehingga pabrik tidak bisa berlaku seenaknya kepada pekerja. Bisa dikenakan sanksi, bila melanggar hukum,” tegasnya.

Terkait soal LGBT, menurut Fadli pada umumnya masyarakat menolak LGBT, tidak mentolerir meski itu ada sebagai penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Tetapi hal itu tidak boleh dilegitimitasi, kemudian diberi ruang untuk justifikasi dan meresmikan keberadaannya, semuanya menolak itu. Penyimpangan seperti itu sangat meresahkan. Di negara-negara barat memang kampanyenya luar biasa.

“Pengalaman terbaru, pada sidang Parlemen Dunia di Jenewa yang diperjuangkan parlemen negara barat adalah soal LGBT. Namun Delegasi DPR menolak, kemudian disusul parlemen negara-negara Timur Tengah juga menolak. Tuntutan mereka agar LGBT dihormati, lalu keputusannya diambil melalui *voting*. Kita konsisten. Kita juga harus tegas menolak kampanye LGBT baik secara kuratif maupun preventif, karena bisa menjalar,” ia menambahkan.

■ mp/sf

Komisi I Berupaya Jadikan BIN Semakin Profesional

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung menegaskan, Komisi I DPR RI akan terus berupaya menjadikan Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai lembaga yang profesional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan anggaran BIN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung

Foto: Eko/jk

Asril menjabarkan, pada tahun 2016 anggaran BIN sebesar Rp 2,02 triliun. Pada tahun 2017, anggaran ditingkatkan menjadi Rp 5,35 triliun. Dan pada bulan Juli 2017, melalui pembahasan APBN-Perubahan, Komisi I DPR RI telah berhasil menambah anggaran BIN sebesar Rp 4 triliun lebih, sehingga anggaran BIN menjadi Rp 9,8 triliun.

“Dengan demikian, jika dibanding tahun 2016 lalu, anggaran BIN tahun 2017 mengalami peningkatan lebih dari Rp 7 triliun,” kata Asril saat memimpin

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (18/10).

Legislator Partai Gerindra itu menambahkan, Komisi I DPR RI berharap dengan penambahan anggaran ini, kinerja BIN semakin meningkat dan semakin baik. Untuk anggaran BIN tahun 2018 sebesar Rp 5,6 triliun. Harapannya, anggaran BIN pada APBN 2019 minimal bertahan, bahkan bertambah karena menghadapi perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Asril mengatakan, tujuan kunspek ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai kinerja mitra kerja Komisi I DPR RI, dalam hal ini BIN Daerah Jabar. Selain itu pihaknya juga ingin mendapat laporan tentang perkembangan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh mitra kerja Komisi I DPR di daerah. ■ eko/sf

Deteksi Kerawanan Pemilu 2019, Komisi I Kunjungi Banten

Komisi I DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Banten guna melihat peran Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Banten dalam mencegah dan mendeteksi dini terhadap kerawanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dan keberadaan Warga Negara Asing (WNA).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha mengatakan, pihaknya juga ingin mengetahui penyalahgunaan kebijakan bebas Visa dan kejahatan terorisme, serta menyerap informasi mengenai kondisi serta isu-isu yang berkembang di Banten. Pasalnya, banyak sekali isu-isu yang harus diantisipasi terutama isu SARA dan radikalisme.

“Kita ingin mendapatkan informasi yang langsung dengan Binda Banten, bagaimana menangkal isu terkait SARA, isu radikalisme tersebut, sehingga perhelatan Pemilu serentak 2019 bisa berjalan dengan baik,” tutur Satya di Tangerang, Banten, Kamis (18/10). Dalam pertemuan itu, hadir Kepala Binda Banten Hendi Hendra Bayu Prasetya beserta jajaran.

Untuk mengantisipasi adanya kerucuhan

pada saat pemilu serentak, legislator Partai Golkar ini mengharapkan, Binda Banten mengelompokkan berbagai macam gerakan yang akan menimbulkan kerucuhan pada saat pemilu serentak nanti, baik dari isu SARA hingga radikalisme.

“Untuk penanganannya, kami sudah berkoordinasi dengan pihak Binda Banten, nanti akan ada tindakan yang sifatnya defensif ataupun juga responsif. Dengan begitu, pada saat kita melaksanakan pesta demokrasi di bulan April 2019 mendatang bisa berjalan dengan aman dan baik,” tegas Satya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Kartika Yudhisti menuturkan, dalam pertemuan dengan Kabinda Banten beserta jajaran itu, pihaknya banyak meminta gambaran situasi yang ada di Banten, baik mengenai isu tenaga kerja asing,



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha

Foto: Rryan/jk

penyalahgunaan narkoba serta persiapan Pemilu 2019 serta kondisi dan peran Binda Banten sendiri.

“Mengetahui peran Binda Banten sudah bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik melakukan cegah dini terkait isu-isu yang berkembang di masyarakat dan mengatasi kerawanan-kerawanan,” tutur legislator PPP itu menambahkan.

■ ryan/mp/sf

Komisi VII Sesalkan KLHK Tak Awasi PT. OKI Pulp and Paper Mills



Tim Kunspek Komisi VII DPR RI meninjau PT. OKI Pulp dan Paper Mills

Anggota Komisi VII DPR RI Julian Gunhar menyesalkan tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT. OKI Pulp and Paper Mills di Sumatera Selatan, yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Selama dua tahun beroperasi, PT. OKI Pulp and Paper Mills dikabarkan menghasilkan 8 juta ton limbah per tahun. Menurutnya, ini tentu sangat memprihatinkan.

“Itu terbukti hari ini kami mengunjungi langsung perusahaan ini, udara sangat bau dan tidak sehat. Begitupun dengan air sungai yang ada di sekitar PT, terlihat berwarna keruh. Dan yang lebih disayangkan lagi, ternyata selama ini tidak ada pengawasan langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

terhadap perusahaan ini,” kata Julian usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI ke PT. OKI Pulp and Paper Mills, Sumsel, Jumat (19/10).

Dilanjutkan Julian, sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Sumsel, secara pribadi ia sempat mendatangi perusahaan tersebut.

Tentu untuk melihat secara langsung aduan masyarakat yang disampaikan kepadanya. Namun sayangnya pihak perusahaan ketika itu tidak mengizinkannya masuk. Sehingga ia gagal mengetahui kondisi sebenarnya perusahaan itu. Padahal sebagai wakil rakyat, pihaknya diamanatkan oleh undang-undang untuk menindaklanjuti aduan atau laporan dari masyarakat yang diwakilinya.

Setelah melihat kondisi perusahaan tersebut secara langsung, Tim Kunspek Komisi VII DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI M. Nasir meminta agar Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) KLHK segera menindaklanjuti hal itu,



Foto: Ayu/jk

dengan membuat penyelidikan dan memberikan sanksi kepada perusahaan. Itu semata agar pencemaran lingkungan yang dilakukan perusahaan tersebut dapat segera dihentikan.

“Kami berharap Gakkum dari KLHK tegas melakukan pengawasan ke semua perusahaan yang diduga melakukan pencemaran lingkungan, salah satunya kepada PT. OKI Pulp and Paper Mills ini. Bahkan kami minta agar Gakkum menghentikan sejenak pengolahan limbah perusahaan yang diduga tidak dilakukan dengan baik, sehingga telah mencemari lingkungan sekitar. Hal itu semata agar pencemaran lingkungan sekitar perusahaan tersebut tidak semakin parah,” tegasnya. ■ ayu/sf

Komisi II Temukan Kendala Hadapi Pemilu 2019 di Babel

Anggota Komisi II DPR RI Melda Addriani menilai masih ada beberapa kendala yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Beberapa kendala yang masih belum terselesaikan itu diantaranya mengenai KTP ganda dan penyebaran dan pengawalan surat suara ke wilayah yang belum terjangkau, karena Babel merupakan daerah kepulauan.



Foto: Eno/jk

Anggota Komisi II DPR RI Melda Addriani

“Kemudian pasca Pemilu, terkait bagaimana mengawal suara-suara tersebut, karena Panwaslu sendiri tidak mau terjun langsung untuk mengawasi. Sehingga banyak suara yang hilang,” ujar Melda usai mengikuti pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Babel, KPU dan Bawaslu, di Kantor Gubernur Babel, Kamis (18/10).

Melda menjelaskan jangkauan antara satu pulau ke pulau lainnya di Babel bisa menempuh waktu 1-3 jam, sehingga diharapkan Panwaslu atau KPU cepat tanggap untuk meraih hak suara mereka. Ia menginginkan untuk penyelesaian masalahnya, Pemprov Babel ikut mendukung KPU, agar tidak terjadi kecurangan. Menurutnya KPU dan Panwaslu seharusnya dapat bekerja sama dalam hal ini.

Selain masalah-masalah itu juga, legislator Partai Golkar ini menjelaskan masih ada permasalahan lain di Babel.

“Banyak yang pasang iklan (kampanye, RED) di mobil, itu seharusnya Panwaslu harus cepat tanggap, karena sudah ada peraturan yang melarang hal tersebut,” tegas legislator dapil Babel itu.

Menanggapi permasalahan KTP ganda, KPU akan melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota, stakeholder, dan Bawaslu terhadap data ganda yang disampaikan oleh Bawaslu dan partai politik. Kemudian melakukan analisis dan pencermatan terhadap data ganda untuk dilakukan perbaikan, dan menurunkan data ganda tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota dan diteruskan kepada PPK dan PPS untuk dilakukan verifikasi.

Kemudian dari masalah menjangkau suara-suara dari daerah kepulauan, KPU dan Gubernur Babel akan meminta bantuan dari TNI AL untuk mengawal suara-suara yang akan dikumpulkan untuk segera dihitung agar hak para pemilih terpenuhi. ■ eno/sf



Tim Kunspek Komisi II DPR RI berfoto bersama Wakil Gubernur Kaltim

Foto: Erman/jk

Pemprov Kaltim Harus Hati-Hati Terhadap Maraknya OTT

Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo prihatin terkait maraknya kepala daerah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir ini. Ia berpesan agar Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) dan Pemkot Balikpapan bersikap hati-hati dan selalu waspada terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi.

“Saya menitipkan pesan moral kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kami banyak menaruh harapan karena Kaltim merupakan salah satu provinsi yang memberikan sumbangan devisa kepada negara cukup besar,” ujar Firman pada saat Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (18/10).

Kalimantan Timur memiliki potensi energi terbarukan yang sangat melimpah. Legislator F-Golkar ini mencontohkan salah satu potensi yang dimiliki Kaltim adalah kelapa sawit. Hingga saat ini potensi tersebut masih diperlukan pengembangan dan pengelolaan melalui beberapa program yang efektif.

“Jangan sampai OTT KPK terhadap kepala daerah, mengusik potensi-potensi yang seharusnya berkembang. Saya

minta kepada Ombudsman mengedukasi pemerintah daerah tentang konsekuensi bilamana terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan apalagi ada unsur korupsinya,” imbau Firman.

Firman mencontohkan Ombudsman di Australia bekerja sama dengan Independent Commission Against Corruption (ICAC) atau KPK nya Australia. Di sana lebih banyak berikan edukasi pendampingan kepada aparat penegak hukum dan penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintahan tentang konsekuensi dan resiko bilamana terjadi tindak tindak korupsi.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) merupakan lembaga negara yang belum lama terbentuk. Saat ini sudah mengalami peningkatan serta ada perwakilan di tingkat provinsi.

“Harapan saya Ombudsman bisa memprakarsai kerja sama lintas sektor dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti dengan KPK, kepolisian, kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya untuk senantiasa melakukan edukasi dan pengawasan, terutama berkaitan dengan pelayanan publik,” pungkas legislator F-Golkar itu.

Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Spesifik (Kunspek) ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Pertemuan dengan Wakil Gubernur Kaltim, Wali kota Balikpapan, ORI Kaltim, Kakanwil BPN Kaltim serta Kakan BPN Balikpapan salah satu agenda yang dibahas adalah terkait pengawasan pelayanan publik oleh ORI Kalimantan Timur.

Kunspek yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron (F-Demokrat), juga diikuti oleh Eddy Kusuma Wijaya, M. Hasbi Asyidiki Jayabaya (F-PDI Perjuangan), M. Afzal Mahfuz (F-PD), Abdul Hakam Naja (F-PAN), Evi Fatimah (F-PKB), Aus Hidayat Nur (F-PKS), Kresna Dewanata Phrosakh (F-NasDem) dan Sudiro Asno (F-Hanura). ■ es/mp

DPR Desak Pembangunan Infrastruktur Jambi Dikebut

Komisi V DPR RI mendesak percepatan penyelesaian proyek pembangunan infrastruktur dan transportasi yang dilaksanakan pemerintah pusat di Provinsi Jambi. Dengan selesainya seluruh proyek pembangunan prioritas ini, diharapkan dapat mendorong dan mempercepat pertumbuhan perekonomian masyarakat Jambi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi dan sekitarnya.

“ Kita mengharapkan agar pembangunan di bidang infrastruktur dan transportasi dapat mempercepat Bergeraknya sektor ekonomi dan sektor lainnya, yang akan berdampak terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Jambi dan sekitarnya,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratto (F-Demokrat) saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi V DPR RI ke Jambi, Kamis (18/10).

Rangkaian kegiatan Kunspek

dimulai dengan ekspose singkat di Bandara Sultan Thaha Jambi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi tentang infrastruktur dan transportasi di Jambi. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, BMKG, Basarnas dan PT. Angkasa Pura II.

Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan kegiatan perluasan Bandara Sultan Thaha Jambi, dan meninjau pembangunan jalan menuju Pelabuhan

Ujung Jabung, kemudian menuju pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Batanghari. Perjalanan dilanjutkan menuju pembangunan Jembatan Batanghari Tiga, dan terakhir tinjauan di kawasan Danau Sipin.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Bakri (F-PAN) mengatakan semua pembangunan ini dianggarkan APBN dan terus berjalan progresnya. Ia berharap pada tahun anggaran 2019, Jambi tetap mendapatkan kucuran anggaran dari pemerintah pusat. Alasannya, masih ada pekerjaan dan proyek yang harus selesai secepatnya.

“Saya berterima kasih kepada Komisi V bisa berkunjung ke sini. Hasil kunjungan ini yang menentukan rapat di DPR dan tentu juga menyesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini. Jambi ini perlu perhatian, tidak bisa dibangun dengan APBD provinsi maupun kabupaten. Yakinkan pula pemerintah bahwa Jambi ini perlu dibangun,” harap legislator dapil Jambi ini. ■ as/sf



Foto: Agung/jk

Tim Kunspek Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratto meninjau proyek pembangunan infrastruktur di Jambi



Tim Kunspek Komisi VII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam bertukar cenderamata dengan Direksi PT. Sritex dan PT. RUM

Foto: Sofyan/jk

Komisi VII Dorong PT. Sritex Raih *Proper Gold*

Komisi VII DPR RI mendorong PT. Sri Rejeki Isman (PT. Sritex) untuk meraih *proper gold*. Pasalnya, selama PT. Sritex beroperasi selama lebih dari 30 tahun di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, hanya mendapatkan *proper biru*. Untuk menuju *proper gold*, PT. Sritex harus melewati *proper hijau*. *Proper biru* berada dua tingkat di bawah *proper gold*.

hal ini udara di sekitar pabrik. Akhirnya, berdasar kajian dan Surat Keputusan dari Bupati Sukoharjo, pabrik ini pun ditutup selama 8 bulan.

“Per 28 September ini PT. RUM sudah bekerja kembali. Dalam pantauan yang dilakukan setiap 15 menit, ada kemajuan. H2S sudah turun di level 5 dari level 30, ini sudah bagus. Selama ini yang dikeluhkan masyarakat itu limbah udara. Dari 3 jenis jenis limbah, limbah cair dan padat tidak masalah, tinggal limbah udara. Dirut PT. RUM berjanji agar tidak terjadi limbah bau lagi ke depannya,” imbuh legislator Partai Golkar itu.

Namun, Ridwan mengaku pihaknya tidak sepenuhnya mempercayai laporan yang ada. Alasannya, kunjungan ini dilakukan secara terencana, sehingga direksi pun menyajikan laporan yang bagus dan terbaik. Untuk itu, ia berjanji suatu saat nanti pihaknya akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) kepada tiga perusahaan ini. Sidak ini guna memastikan langkah-langkah perusahaan memperbaiki pengelolaan limbah berjalan signifikan.

“Dari laporan sudah bagus. Ke depannya, kami akan sidak yang tidak diberitahukan sebelumnya, sehingga kami yakin bagaimana pabrik ini beraktivitas.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dengan Direksi PT. Sri Rejeki Isman, Tbk (PT. Sritex), PT. Rayon Utama Makmur (PT. RUM), PT. Kenindo Grand Sejahtera (PT. KGS), Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, di aula PT. Sritex, Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (19/10).

“Kami melihat dan memonitor secara langsung pengelolaan limbah yang dihasilkan PT. Sritex, PT. RUM, dan PT. KGS. Dari hasil yang

kami terima, PT. Sritex diharapkan meningkatkan *proper* sampai *gold*. Direksi juga berharap akan meningkatkan menjadi minimal *proper hijau*, dan akan mengupayakan menjadi *gold*. Ini pun menjadi cita-cita dari pendiri PT. Sritex, Bapak Lukminto. Pabrik ini digunakan kepentingan masyarakat,” kata Ridwan.

Sementara untuk pengelolaan limbah PT. RUM, Ridwan mengatakan pihaknya memberikan catatan cukup kritis. Pasalnya, pabrik rayon ini ketika memulai produksi sekitar 2 bulan, namun kemudian mendapat keluhan dari masyarakat karena adanya kebocoran limbah udara yang dianggap mencemari lingkungan, dalam

Kami tidak akan memberitahu kapan kami datang. Kami mengingatkan agar pabrik memperbaiki aktivitasnya dan melindungi masyarakat. Kami tidak mau pabrik tutup, karena pabrik ini menyerap tenaga kerja. Jika tutup, akan mengakibatkan pengangguran,” jelas Ridwan.

Legislator dapil Jawa Timur itu berharap kepada Pemkab Sukoharjo untuk membina dan mengawal aktivitas perusahaan yang berada di wilayahnya. Menurutnya, pengawasan dari pemerintah pusat sudah dilimpahkan ke Pemkab Sukoharjo. Sehingga, jika Pemkab Sukoharjo tidak memiliki tenaga ahli untuk memantau pengelolaan limbah, bisa bekerjasama dengan konsultan dari perguruan tinggi.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Riyanto meminta polemik PT. RUM tersebut agar diselesaikan secara terpadu. Sebagai perusahaan yang baru berdiri, Bambang menilai perusahaan sedang melakukan uji coba. Legislator Partai Gerindra itu pun menilai, langkah-langkah yang diambil PT. RUM untuk menyelesaikan bau limbah, atau limbah udara, harus diapresiasi.

“Bila kita lihat, inovasi dan niat baik dari PT. RUM itu ada. Selama ini kita kan masih impor rayon, sedangkan kita sudah bisa memproduksi sendiri. Langkah-langkah itu harus diapresiasi, karena itu langkah-langkah yang positif. Permasalahan utamanya apa? Lalu penanganannya seperti apa? Kita cari jalan keluarnya, agar tidak merugikan masyarakat sekitar,” tegas legislator dapil Jawa Tengah itu.

Mantan Bupati Sukoharjo dua periode ini tidak menampik, bahwa tujuan berdirinya pabrik tersebut yakni untuk mengangkat iklim investasi daerah, dimana warga sekitar bisa diberdayakan dengan dipekerjakan dan investasi yang sudah ditanam bisa berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi warga sekitar dan berdampak pada pendapatan asli daerah. Namun, lingkungan di sekitar pabrik juga harus diperhatikan.

Sementara itu, Direktur PT. RUM Rahmat, menjelaskan semua upaya telah dilakukan oleh pihaknya untuk menangani permasalahan limbah tersebut, diantaranya pemasangan *Wet Scrubber* atau alat pengolahan limbah.

Terkait dorongan dari Komisi VII DPR RI untuk meningkatkan *proper* PT. Sritex, Wakil Presiden Direktur PT. Sritex Iwan Kurniawan Lukminto berkomitmen untuk meningkatkan menjadi *proper* hijau, bahkan *gold*. ■ sf

Kekeringan Picu Kebakaran Kawasan Wisata Gunung Bromo

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu daerah yang rawan terjadi bencana. Antara lain bencana kebakaran lahan yang terjadi setiap tahunnya di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Kekeringan yang terjadi di kawasan obyek wisata Gunung Bromo itu turut memicu bencana lainnya seperti, kebakaran areal Padang Savana dan Taman Teletubbies.

“Komisi VIII akan terus berjuang untuk memecahkan permasalahan kebencanaan, karena tidak ada cara lain paling mudah dalam mengantisipasi bencana dengan pencegahan yang harus dilakukan dengan baik. Pemerintah bersama masyarakat pun harus mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi kebencanaan,” jelasnya saat memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Bupati Probolinggo beserta jajaran di Pendopo Kantor Bupati Probolinggo, Jawa Timur, Selasa (16/10).

Dalam kesempatan ini, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari mengungkapkan sulitnya berkoordinasi saat bencana kebakaran lahan, terjadi di Kawasan TNBTS. Menurutnya masyarakat beranggapan, Gunung Bromo merupakan ikon Kabupaten Probolinggo dimana saat terjadi masalah atau bencana, yang kaitannya Gunung Bromo, selalu menjadi tamparan bagi Pemkab Probolinggo.

Padahal kata Bupati Tantri, ada lembaga yang berwenang menangani kawasan obyek wisata Gunung Bromo yakni TNBTS. Atas hal itu, Bupati meminta perlu adanya pembahasan bersama, atau sinergitas antara Pemkab Probolinggo dan TNBTS. “Tidak ada satu kewenangan apapun, yang akan kita langkahi. Sekali lagi, Pemkab Probolinggo tidak akan mengambil kewenangan dari pihak TNBTS,” tegasnya.

Menyikapi keluhan Bupati Probolinggo, Marwan menyebut akan mendorong menggelar rapat dan memanggil sejumlah mitra kerja Komisi VIII DPR RI guna mengatasi masalah tersebut. “Semestinya ada koordinasi dan sinergi yang baik antara BNPB dan Kehutanan serta pihak pengelola TNBTS saat pencegahan maupun terjadinya bencana kebakaran lahan. Apalagi kebakaran lahan masuk siklus tahunan,” kata Marwan mengingatkan. ■ ran/mp/sf



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memimpin pertemuan Tim Kunspek dengan Bupati Probolinggo

Foto: Rizka/JK



Foto: Eka/jk

Tim Kunspek Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo meninjau objek wisata Kete Kesu, di Tana Toraja, Sulsel

Aksesibilitas Dukung Peningkatan Kunjungan Wisatawan

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Untuk itu, aksesibilitas menuju kawasan destinasi harus memadai, sehingga dapat mendukung peningkatan kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara.

“Akses jalan pendukung kawasan destinasi wisata harus memadai, sebagai jaminan bahwa negara memberikan dukungan infrastruktur aksesibilitas untuk mendukung program pariwisata,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi V DPR RI meninjau objek wisata Kete Kesu, di Tana Toraja, Sulsel, Kamis (18/10).

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu memaparkan, kemudahan

aksesibilitas juga mampu mendorong perekonomian lokal serta pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga, tidak sedikit pemerintah daerah yang mengusulkan agar akses jalan yang semula statusnya jalan kabupaten/kota atau provinsi untuk dijadikan jalan nasional.

“Dukungan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung seperti ketersediaan sumber air seperti embung atau waduk, air bersih, sanitasi dan lainnya menjadi hal

lain yang perlu dipikirkan oleh pemerintah ke depannya, agar pariwisata bisa berdampak signifikan dan masif,” tegas legislator dapil Jawa Timur itu.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Bahrum Daido (F-Demokrat) yang juga putera asli Toraja Utara mengatakan, keinginan kuat pemerintah daerah untuk merangkai titik-titik destinasi wisata menjadi kawasan besar sangat memerlukan dukungan pemerintah pusat, khususnya DPR RI. ■ hr/sf



Foto: Suci/jk

Tim Kunspek Komisi II DPR RI berfoto bersama staf DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo

Komisi II Nilai Baik Layanan Publik Sidoarjo

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai Pelayanan Publik di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sudah berjalan dengan baik. *One Stop Service* yang diterapkan di Pelayanan Perizinan sudah berjalan dengan baik. Masyarakat dimudahkan dalam mengurus izin.

“Selain itu di ruang depan lobi Kantor Perizinan juga sudah ada tempat konsultasi dalam mengurus proses izin,” kata Mardani usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI meninjau Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo, Jatim, Senin (22/10).

Ia mengatakan kedatangan, Tim Kunspek Komisi II DPR RI ke Sidoarjo untuk memastikan pelayanan publik di daerah berjalan dengan baik, salah satunya adalah pelayanan perizinannya. Pihaknya, lanjut Mardani, ingin melihat langsung proses perizinan *online* di Sidoarjo yang sudah menerapkan Sistem *Online Single Submission* (OSS).

Lebih lanjut Mardani menyatakan, Komisi II DPR RI juga ingin melihat inovasi pelayanan publik yang sudah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, untuk kemudian oleh Komisi II DPR RI akan disampaikan ke daerah lain untuk mencontoh pelayanan publik Pemkab Sidoarjo.

Pelayanan Publik di Sidoarjo, menurut legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, dinilai oleh pemerintah pusat termasuk salah satu daerah yang memiliki prestasi. Sudah banyak inovasi pelayanan publik yang diakui sampai tingkat nasional.

“Sidoarjo ini termasuk daerah yang berprestasi. Diantaranya adalah pelayanan publiknya. Kedatangan kita ke sini karena ingin tahu apakah betul pelayanan publiknya berjalan dengan baik. Maka kita langsung ke lapangan dulu sebelum ketemu dengan bupati untuk mendengar paparannya,” imbuh legislator dapil Jawa Barat itu.

Kepala Dinas DPMPTSP Ari Suryono usai menerima kunjungan Komisi II DPR RI menyampaikan, program OSS di Sidoarjo baru di-*launching* bulan Agustus 2018, tidak ada perizinan yang diproses di luar sistem OSS. Semua izin diurus lewat OSS. Ari meyakini dengan penerapan sistem perizinan OSS ini akan menjadi solusi dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan.

“Saat ini sudah ada 2200 izin yang sudah dilayani DPMPTST, yang paling banyak adalah izin terkait IMB (Izin Mendirikan Bangunan), secara umum program OSS berjalan dengan baik,” ungkap Ari.

Sistem perizinan OSS ramai dibicarakan setelah keluarnya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 pada bulan September 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Usaha. OSS adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.

OSS dimaksudkan untuk memangkas waktu dan birokrasi dalam proses perizinan usaha. Kebijakan ini diambil pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia usaha yang selama ini mengeluhkan panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha.

Sementara itu saat pertemuan dengan Tim Kunspek Komisi II DPR RI, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah menjelaskan banyak inovasi yang sudah dibuat oleh Pemkab Sidoarjo. Selain penerapan perizinan *online* OSS, ada lagi inovasi yang sudah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Diantaranya Si Manies yang dibuat oleh RSUD Sidoarjo untuk menekan angka kematian ibu dan anak saat proses melahirkan. Inovasi tersebut masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Nasional.

“Si Pekat atau yang dikenal dengan Sistem Informasi Kenaikan Pangkat yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Daerah, inovasi ini juga masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Nasional,” papar Bupati Saiful Ilah.

Bupati Saiful Ilah juga menyampaikan, dirinya telah membuat kebijakan yang mendorong agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat minimal satu inovasi. Hal ini dilakukan Saiful Ilah agar pelayanan publik di Sidoarjo lebih baik lagi.

“Tiap OPD minimal satu inovasi. Saat ini pemerintah didorong untuk berlomba-lomba memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, birokrasi yang cepat dalam pelayanan, tidak bertele-tele dan birokrasi yang bersih,” jelas Bupati Saiful Ilah. ■ sc/sf

Produsen dan Penyalur Serius Kampanyekan B20

Kampanye penggunaan biodiesel dengan menggunakan campuran sawit 20 persen atau yang disebut B20 sudah berjalan baik. Setidaknya ini terlihat dari aktivitas produsen dan penyalur B20 di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, yang progresnya cukup baik. Komisi VII DPR RI mengapresiasi PT. Wilmar Nabati Indonesia, yang memproduksi energi B20.



Foto: Arief/jk

Tim Kunspek Komisi VII DPR RI berfoto dengan Direksi PT. Wilmar Nabati Indonesia

“Sudah ada keseriusan antara produsen dan penyalur dalam mengkampanyekan penggunaan B20. Seperti diketahui, energi B20 selain ramah lingkungan, juga diproyeksikan untuk mengurangi impor

BBM,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dengan Direksi PT. Wilmar Nabati Indonesia, di Gresik, Jatim, Jumat (19/10).

Syaikhul menambahkan, penggunaan energi B20 sudah berjalan sejak tahun 2016 dan tidak ada masalah. Menurutnya, jika ada pihak-pihak yang mencoba untuk tidak mendukung atau menolak B20, itu alasan yang tidak kuat, karena ini program ramah lingkungan dan sangat membantu mengurangi impor BBM. “Komisi VII mendukung penuh pemerintah dalam implementasi B20 ini,” tegas legislator PKB ini.

Menurutnya, persoalan yang masih tersisa adalah transportasi untuk mendistribusikan B20 ini. Walau di Jatim tidak terlalu bermasalah, namun bagi daerah-daerah terpencil transportasi masih jadi masalah. Bagi daerah-daerah dengan persoalan geografis yang terisolir pasti akan menemukan kendala distribusi, tidak saja B20, tapi distribusi BBM jenis lain juga pasti terhambat.

“Saya mendengar dari PT. Wilmar bahwa dengan adanya B20 ini ternyata dapat menumbuhkan semangat baru dalam produksi minyak kelapa sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO), karena permintaan CPO terus naik. Jadi adanya B20 ini sangat menguntungkan dari sisi bisnis,” tandas legislator dapil Jawa Timur itu. ■ afr/sf

Komisi IX Kecewa Tak Hadirnya Pekerja Non Penerima Upah di Kepri

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau dimaksudkan untuk mengevaluasi berbagai hal terkait BPJS Ketenagakerjaan sekaligus untuk mendengarkan masalah, kendala dari program pengembangan dan perluasan kepesertaan.

Namun kata Saleh, dalam pertemuan kali ini ada kendala yaitu tidak hadirnya para pekerja bukan penerima upah seperti ojek *online*, buruh angkut di pasar, asosiasi pedagang kaki lima. Padahal sebenarnya Komisi IX DPR RI ingin mendengarkan langsung permasalahan dari para pekerja tersebut.

Hal itu dikatakannya saat memimpin pertemuan Panja BPJS Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI dengan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Isdianto, Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbar-Riau, Kadin Kepri serta perwakilan Dinas Tenaga Kerja kabupaten/kota se-Kepri di Batam, Kepri, Selasa (16/10).

“Sebenarnya kita ingin menggali informasi langsung dari masyarakat khususnya para pekerja bukan penerima upah tersebut, tapi sangat disayangkan mereka tidak ada yang hadir. Apakah tidak diundang atau diundang tetapi tidak hadir, karena hal hal yang lebih spesifik yang akan kita gali dari Panja BPJS Ketenagakerjaan, ke depan ini harus menjadi evaluasi,” tegas Saleh.

Menurut Saleh, sekarang industri yang ada di Batam ini sedang mengalami masa-masa fluktuatif, ada yang sedang naik dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan meningkat, tetapi ada juga industri yang malah justru tutup.

“Industri-industri yang tutup atau berkurang pegawainya tentu

BPJS Ketenagakerjaan Perlu Tingkatkan Sosialisasi

Anggota Panitia Kerja (Panja) BPJS Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI Irma Suryani menegaskan, BPJS Ketenagakerjaan perlu meningkatkan sosialisasi yang masif di Provinsi Sumatera Barat. Pasalnya, jumlah kepesertaan pekerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan di Sumbar masih minim.

“ Dari hampir seluruh daerah, Sumbar ini paling rendah tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya. Jumlah penduduk Sumbar ada 5,322 juta jiwa, dengan angkatan kerja ada sebanyak 2,64 juta orang (data BPS 2017) serta 88.546 tenaga aktif kerja dari 4.063 perusahaan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Irma dalam Kunjungan Kerja Spesifik Panja BPJS Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI ke Padang, Sumbar, Selasa (16/10).

Legislator Partai Nasdem itu menilai, minimnya peserta BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan ketidakpahaman para pekerja akan manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Beberapa faktor penyebab rendahnya keterlibatan pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah tingkat sosialisasi yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat lemah.

Untuk itu, ia mendorong Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk ke daerah, melihat faktor penyebab rendahnya peserta BPJS Ketenagakerjaan di Sumbar. Sosialisasi sangat diperlukan, pasalnya jaminan sosial sangat penting dimiliki oleh seluruh pekerja Indonesia karena risiko sosial ekonomi itu bisa terjadi kepada siapa saja, dimana saja dan terhadap siapa saja.

“Risiko sosial ekonomi itu seperti kecelakaan dan kematian. BPJS harus jemput bola memberi pemahaman

Beberapa faktor penyebab rendahnya keterlibatan pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah tingkat sosialisasi yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat lemah



Anggota Panja BPJS Ketenagakerjaan Irma Suryani

Foto: Nadya/jk

kepada masyarakat akan manfaat BPJS Ketenagakerjaan ini. Pengawas jangan hanya duduk saja, turun ke bawah lihat kenapa terjadi hal seperti ini, benahi manajemannya,” tegas legislator dapil Sumatera Selatan itu.

Adapun jaminan sosial tenaga kerja yang bisa mereka ikuti adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian. Jaminan Hari Tua (JHT) juga bisa mereka ikuti dengan menambah iuran. ■ rnm/sf



Tim Panja BPJS Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI bertukar cenderamata dengan Wakil Gubernur Kepri

Foto: Azka/jk

kepesertaannya turun. Ini yang sedang kita lihat apa implikasinya, termasuk daya saing Batam ini, khususnya Kepri dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Itu juga yang harus kita evaluasi,” kata Saleh.

Lebih lanjut legislator PAN ini menginginkan Batam agar menjadi daerah industri yang bisa dijadikan sebagai tempat masyarakat mendapatkan pekerjaan seperti waktu lalu.

“Dulu Batam sangat terkenal dan banyak orang yang bekerja di sini, tapi sekarang kelihatannya pamornya sudah mulai berkurang. Ini akan kita jadikan evaluasi di internal Komisi IX, selain BPJS Ketenagakerjaan juga aspek penciptaan lapangan kerja,” pungkas legislator dapil Sumut ini. ■ azk/mp

Komisi X Himpun Masukan RUU Dosen di Malang



Foto: Rumi/jk

Pertemuan Tim Kunspek Komisi X DPR RI dengan sejumlah Rektor Perguruan di Kota Malang, Jatim

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dengan Ikatan Dosen Republik (IDRI) pada Maret 2018 lalu, didapat masukan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen perlu direvisi dan pemisahan regulasi antara guru dan dosen. Guna merevisi UU itu, Komisi X DPR RI pun menghimpun sejumlah masukan untuk melengkapi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Dosen.

“ Karena itu saya dan tim hadir di sini untuk mendapatkan masukan terkait RUU tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi X DPR RI dalam rangka menghimpun masukan terkait RUU Dosen di Universitas Brawijaya, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Kamis (18/10).

Turut hadir dalam pertemuan ini diantaranya Rektor Universitas Barawijaya Malang, Rektor Universitas Negeri Malang, Direktur Politeknik Negeri Malang, Direktur Poltekes Malang dan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Hadir pula Ketua Asosiasi Dosen Indonesia Provinsi Jawa Timur dan instansi terkait.

Menurut legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, beberapa masukan ada yang mengatakan setuju untuk direvisi dan adapula yang mengatakan tidak perlu. Meski demikian akan diserap semua masukan dan akan didiskusikan lebih lanjut.

Bahas RUU Dosen, Komisi X Serap Masukan Akademisi Unand

Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi X DPR RI dipimpin Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menemui rektor dan akademisi Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat, dalam rangka meminta masukan dan pandangan berkaitan dengan penyusunan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Dosen.



Foto: Iwan/jk

Ketua Tim Kunspek Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah (kedua dari kiri)

Ledia menjelaskan, Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang merupakan payung hukum dalam mengatur profesi guru dan dosen dianggap belum mengatur secara spesifik, karena UU tersebut masih menyatukan persepsi mengenai guru dan dosen.

“Meski keduanya disebut sebagai pendidik profesional, guru dan dosen

memiliki perbedaan, diantaranya guru mempunyai kedudukan sebagai pendidik profesional pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan informal, pendidikan dasar dan menengah,” jelas Ledia saat pertemuan dengan Rektor dan civitas akademika Unand, di Gedung Rektorat Unand, Padang, Jumat (19/10).

Sedangkan dosen, tambah legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu,

bertugas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu tidak hanya melakukan tugas pengajaran tetapi juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk itu, sejumlah regulasi terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan mendorong menjadi bangsa yang maju dan unggul secara global.

Kata Fikri, pembahasan ini baru tahap awal dengan menghimpun langsung masukan dari akademisi. Ditemukan fakta, hampir semua menghendaki revisi atas UU Nomor 14 Tahun 2005. Terutama hal yang paling krusial adalah soal kesejahteraan dosen ataupun guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS).

“Non PNS itu tidak ada regulasi yang jelas dibandingkan yang PNS. Di perguruan tinggi swasta masih ada dosen dengan gaji di bawah upah minimum provinsi. Menurut saya tidak boleh seperti itu dan harus ada solusinya,” papar Fikri.

Persoalan lainnya yakni kelembagaan yang sekarang domainnya sudah berbeda. Semula di Kementerian Pendidikan Nasional, sekarang berubah menjadi dua kementerian, yakni Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Karena lembaganya berbeda, maka sistem administrasi akan berbeda dan persoalan-persoalannya akan berbeda juga,” kata legislator dapil Jawa Tengah itu menambahkan. ■rni/mp/sf

Ledia juga menyampaikan permasalahan dosen yang didapatkan Komisi X DPR RI dari Ikatan Dosen Republik Indonesia, diantaranya gaji dan kesejahteraan, studi lanjut, birokrasi kampus dan ristekdikti, publikasi internasional, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, jam kerja yang berlebihan, penilaian angka kredit, bahasa inggris, akreditasi prodi dan pengajaran.

“Melihat berbagai permasalahan tersebut, terkait penyusunan substansi RUU Dosen, Komisi X mengharapkan masukan dan pandangan dari seluruh para pemangku kepentingan terhadap RUU Dosen, guna mengawal penyelenggaraan pendidikan tinggi agar dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional,” pungkas legislator dapil Jawa Barat I itu.

Sementara itu, Rektor Universitas Andalas Tafdil Husni mengapresiasi dan bangga serta mengucapkan terima kasih atas dipilihnya Unand untuk berdiskusi dalam hal penyusunan substansi RUU Dosen ini. Menurutnya, kegiatan ini sangat penting untuk menyiapkan regulasi yang memberikan manfaat luar biasa dalam pengembangan pendidikan di Indonesia kedepannya. ■ iw/sf

RUU Dosen Diharapkan Mampu Hadapi Tantangan Era Milenial

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra berharap Rancangan Perubahan Undang-Undang (RUU) Dosen yang saat ini akan dibahas oleh Komisi X DPR RI mampu menghadapi tantangan maupun mengakomodir *disruption* (goncangan) di era milenial. Perubahan yang sangat cepat menuntut aturan untuk mengakomodir adanya perubahan.



Tim Kunspek Komisi X DPR RI berfoto dengan sejumlah Rektor Perguruan Tinggi se-DI Yogyakarta

Foto: Nita/jk

Sutan menilai, revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sangat diperlukan, karena telah berusia lebih dari 10 tahun. Menurutnya, walaupun UU Guru dan Dosen terdapat kritik dan kekurangan, namun UU ini harus diakui telah memberikan sisi positif kepada dosen terutama yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Diantaranya peningkatan kesejahteraan dosen dibanding dengan zaman orde baru,” kata Sutan saat mengikuti pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi X DPR RI dengan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Panut Mulyono dan sejumlah Rektor Perguruan Tinggi di DI Yogyakarta, Kamis (18/10).

Legislator Partai Gerindra ini menambahkan, beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam RUU Dosen adalah soal perlindungan hukum terhadap profesi dosen, termasuk perlu adanya penyederhanaan administrasi dosen serta peningkatan kesejahteraan guru honorer.

Sutan juga mengucapkan terimakasih atas kesediaan berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta memberikan masukan dan kajian akademik terkait pembahasan. Ia berharap berbagai masukan ini dapat menjadi bahan bagi penyusunan naskah akademik dan penyusunan draf RUU Dosen.

“Kita ingin ada muatan tentang peningkatan kapasitas, kesejahteraan serta tri darma perguruan tinggi yang diemban dosen dalam RUU ini nantinya,” harap legislator daerah pemilihan (dapil) Jambi ini.

Kunspek yang dipimpin Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjiyanto (Demokrat) itu juga diikuti oleh Anggota Komisi X DPR RI Wiryanti Sukamdani (PDI-Perjuangan), MY Esti Wijayati (PDI-Perjuangan), Zuhdi Yahya (PDI-Perjuangan), Bambang Sutrisno (Golkar), Noor Achmad (Golkar), Popong Otje Djundjungan (Golkar), dan Amran (PAN). ■ nt/sf

Bea Meterai Diharapkan Berikan Kontribusi bagi Pendapatan Negara



Tim Kunspek Komisi XI DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Prakosa berfoto bersama civitas akademika Universitas Padjadjaran

Foto: ica/jk

Rancangan Undang Undang (RUU) Bea Meterai yang saat ini sedang dibahas oleh Komisi XI DPR RI diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan negara. Untuk mendapatkan referensi untuk pembahasan RUU ini, Komisi XI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Bandung, Jawa Barat, guna menyerap masukan-masukan dan aspirasi dari civitas akademika Universitas Padjadjaran (Unpad).

Anggota Komisi XI DPR RI Fathan mengatakan, masukan dari civitas akademika menjadi hal yang penting untuk mendukung pembahasan RUU inisiatif pemerintah ini. Dari hasil diskusi dengan civitas akademika Unpad, Tim Kunspek Komisi XI DPR RI mendapat sejumlah masukan. Misalnya terkait tarif, apakah tetap seperti Pajak Penghasilan (PPh), kemudian terkait besaran dan sanksi.

“Dari hasil diskusi tadi, banyak sekali masukan-masukan yang diberikan dari kampus. Yang menjadi menarik adalah apakah Bea Meterai ini dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan negara yang cukup besar, ataukah justru ikut menekan pertumbuhan ekonomi,” kata Fathan usai diskusi dengan civitas akademika Unpad, di Bandung, Jabar, Kamis (18/10).

Penggunaan Bea Meterai di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1817. Bea Meterai adalah pajak atas dokumen seperti yang telah disebutkan dalam UU Bea Meterai.

Dokumen yang dimaksud adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan. Penggunaan bea meterai pada dokumen menggunakan benda meterai. Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

“Saya kira, yang paling penting adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pemerintah supaya APBN kita bisa dibiayai, oleh salah satunya sumber pajak dari meterai. Tapi, kita juga melihat bahwa tarifnya sudah tidak relevan lagi,” jelas Anggota Fraksi PKB DPR RI tersebut.

Fathan juga mengungkapkan, bahwa di era saat ini, yaitu dengan perkembangan ekonomi, digital, dan teknologi informasi yang sangat pesat juga harus diperhatikan dalam RUU Bea Meterai. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat, mengingat masih banyak transaksi-transaksi yang dilakukan, tetapi belum menggunakan

meterai. “Bisa sebagai sumber pendapatan negara, tetapi harus ada edukasi kepada masyarakat,” imbuhnya.

Legislator daerah pemilihan Jawa Tengah II itu menambahkan, RUU Bea Meterai ditargetkan untuk dapat diselesaikan pada tahun 2018 ini. Ia memastikan RUU Bea Meterai ini akan masuk dalam Prolegnas Prioritas. Menurutnya, tidak banyak pasal yang diperdebatkan dalam RUU Bea Meterai ini.

“Yang agak *urgent* adalah pembahasan mengenai tarif, karena saya kira sudah tertinggal jauh dengan inflasi dan perkembangan ekonomi, sehingga yang harus dilakukan adalah bagaimana *recover* agar mengikuti perkembangan ekonomi digital,” jelas Fathan.

Komisi XI DPR RI berharap pemerintah dapat konsisten dan mempertimbangkan aspek-aspek pertumbuhan ekonomi. Jual-beli merupakan transaksi harian yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga memiliki dampak yang cukup besar. ■ ica/mp/sf

Kunjungi Malang, Baleg Serap Aspirasi Prolegnas Prioritas 2019

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur guna menyerap aspirasi terkait Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2019. Sejumlah produk legislasi disinggung untuk dapat segera diselesaikan diantaranya yakni Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN), RUU Ekonomi Kreatif serta RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR RI Totok Daryanto, sejumlah *stakeholder* seperti civitas akademika, honorer K2 menyampaikan sejumlah masukan terkait percepatan penyelesaian pembahasan undang-undang.

Diantara sejumlah masukan, revisi UU ASN tergolong yang paling mengemuka agar dapat diselesaikan. Turut serta perwakilan honorer K2 menyampaikan aspirasi dan berharap Baleg dapat mendorong aktif pemerintah untuk dapat memahaminya bersama DPR.

“Terkait revisi UU ASN, mudah-mudahan dalam waktu secepatnya Menpan akan bisa hadir di Baleg untuk mulai pembahasan,” tutur Totok di

Pendopo Kabupaten Malang, Kamis, (18/10). Turut hadir Wakil Bupati Malang Sanusi dalam kegiatan ini.

Legislator PAN ini pun menuturkan bahwa DPR RI selalu siap untuk memperjuangkan tenaga honorer untuk mendapatkan kejelasan nasibnya. “Kita libatkan tenaga honorer dalam pertemuan ini agar isu ini menjadi segera mendapat perhatian dan revisi. Karena DPR sudah siap. Pemerintah yang belum siap dengan DIM-nya,” sambung Totok.

Totok menegaskan bahwa DPR RI selalu siap untuk mengakomodir honorer K2, terlebih untuk Kabupaten Malang ditemukan bahwa SK honorer Kabupaten Malang dikeluarkan oleh kepala dinas

terkait, bukan dikeluarkan oleh Bupati. Sehingga ini harus menjadi perhatian khusus.

“DPR sudah siap akomodir tenaga honorer K2 supaya dapat perlakuan yang layak. K2 ini adalah mereka yang sudah bekreja sejak lama di sekolah negeri dan mendapatkan upah jauh dari layak. Ini perlu perhatian pemerintah pusat,” tutur Totok.

Sementara itu Wakil Bupati Malang Sanusi mengapresiasi perhatian Baleg yang memilih Kabupaten Malang sebagai daerah rujukan dalam penyerapan aspirasi prolegnas prioritas 2019, diharapkan produk legislasi yang dihasilkan DPR RI sesuai dengan kebutuhan masyarakat. ■

hs/mp



Tim Kunker Baleg DPR RI dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR RI Totok Daryanto bertukar cenderamata dengan Wakil Bupati Malang

Foto: Hendra/jk

Ketentuan Pidana Harus Diatur dalam RUU Bea Meterai

Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menilai perlu ada pengaturan terhadap ketentuan pidana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Bea Meterai. Pasalnya dengan adanya pengaturan terhadap ketentuan pidana, RUU tersebut nantinya menjadi suatu kekuatan paksa terhadap siapapun yang menjadi objek dari pengenaan tarif meterai.



Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi

Demikian diungkapkan Purnamasidi usai pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XI DPR RI dengan dengan akademisi Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Kementerian Keuangan serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Jawa Tengah di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/10).

“Dalam draf RUU Bea Meterai ini, diakui oleh pihak Kementerian Keuangan belum mengatur pengaturan mengenai sanksi pidana. Maka dari itu, Komisi XI mendesak pemerintah untuk segera mengatur ketentuan sanksi pidana agar terwujudnya penegakan hukum dalam RUU tentang Bea Meterai ini,” ungkap Purnamasidi.

Mengingat adanya wacana pengenaan biaya meterai tidak hanya dikenakan terhadap dokumen yang bersifat kertas namun juga dokumen yang bersifat transaksi eelektronik, ia menilai dengan adanya ketentuan sanksi pidana tentunya dapat menjawab keresahan masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik.

“Sehingga nantinya ketika terjadi wanprestasi antara pihak pembeli dan penjual dalam transaksi elektronik

Foto: Titara/jk



Anggota Baleg DPR RI Luthfi Andi Muty

Foto: Anne/jk

Baleg DPR Diminta Percepat Revisi UU ASN

Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ke Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan mendapat aspirasi untuk mempercepat pembahasan revisi UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Alasannya, UU ini menyangkut nasib 16 ribu guru honorer K2 yang hingga saat ini belum diakomodir pemerintah untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“ Dari pertemuan kami peroleh bahwa masyarakat Sulsel berharap supaya persoalan guru honorer harus jelas nasibnya. Masukkan ini akan kami tampung, dan dibahas dalam rapat Baleg,” kata Anggota Baleg DPR

RI Luthfi Andi Muty saat pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sulsel di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Sulsel, Kamis (18/10).

Diakui legislator Partai NasDem ini, revisi UU ASN sangat urgensi sebab

dengan adanya pengenaan bea meterai, hal itu bisa dibawa ke ranah hukum agar masyarakat yang menjadi korban tadi bisa mendapatkan keadilan,” ungkap legislator Partai Golkar ini.

Terkait pengenaan bea meterai dalam transaksi *online* atau daring sebagai peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara, legislator daerah pemilihan Jawa Timur itu menilai hal tersebut harus disikapi dengan bijak.

“Kita juga harus berhati-hati jangan sampai kemudian dengan adanya pengenaan bea meterai ini bisa mengganggu transaksi-transaksi *online* yang sudah ada saat ini. Jangan sampai nantinya putaran ekonomi kita melalui transaksi *online* menjadi terganggu,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyebutkan, di dalam perubahan RUU tentang Bea Meterai akan ada perluasan terkait objek pengenaan bea meterai.

“Mengingat pada UU tahun 1986 yang hanya mengatur pengenaan pajak atas dokumen berupa kertas, melihat situasi dan kondisi pada zaman ini bahwa transaksi tidak hanya terbatas pada dokumen yang berisfat kertas tapi ada dokumen lain yang bersifat elektronik. Dengan adanya meterai ini nantinya bisa menjadi alat bukti yang sah misalnya di pengadilan dalam bertransaksi elektronik,” ungkapnya. ■ *tra/sf*

masih ada ratusan ribu guru honorer (K2), hanya untuk wilayah Sulsel, yang nasibnya masih terkatung-katung hingga saat ini. Padahal, tidak sedikit dari mereka yang sudah mengabdikan sekian lama dan mendapatkan sertifikasi dari Kementerian PAN-RB namun tidak bisa diangkat PNS karena terbentur persyaratan usia maksimal 35 tahun.

Menurutnya, pemerintah pusat perlu memberikan solusi terhadap hal tersebut. Sebab, tak sedikit proses pembahasan UU di DPR yang mandek karena dari pihak pemerintah yang tidak satu suara. “Ini harus ada *affirmative action* terhadap guru honorer, jumlah 16 ribu ini bukan jumlah yang sedikit, bagaimana kalau berhenti bersamaan kan bisa stuck pendidikan disini,” tandasnya. ■ *ann/mp*

Revisi UU BPK, Komisi XI Serap Masukan Unsri

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir menyampaikan, sudah selayaknya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) diperbaharui, untuk tetap menyesuaikan dengan perkembangan terbaru dalam sistem tata kelola keuangan negara khususnya di Republik Indonesia. Untuk itu, pihaknya menyerap masukan dan aspirasi terkait revisi UU BPK dengan rektor serta para akademisi Universitas Sriwijaya, Palembang.

“Saya melihat, ada 15 pasal yang diusulkan pemerintah untuk dilakukan perubahan. Saya pikir akan bertambah nanti di pembahasan di DPR. Saya kira ini akan tetap menyangkut kepada sistem tata kelola keuangan yang transparan dan kredibel yang selama ini selalu kita dengarkan bersama dengan pemerintah,” kata Hafisz usai memimpin pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan rektor dan akademisi Unsri, di Palembang, Sumsel, Kamis (18/10).

Dalam pembahasan dengan para pakar, legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebutkan ada dua hal yang perlu digarisbawahi untuk dibawa dalam rapat selanjutnya. Menurutnya, apabila kedua masukan tersebut diabaikan maka bisa menimbulkan *backfire effect*.

“Kami menggarisbawahi masukan yang diberikan oleh pakar termasuk tim *ad hoc* dari kampus Unsri bahwa harus dibentuk tim seleksi yang berasal dari independen. Kemudian bahwa dalam pengelolaan keuangan negara ini ada beberapa yang dikuatirkan oleh kepala daerah maupun entitas lembaga yaitu semacam kebijakan atau diskresi yang dilahirkan tanpa melalui proses yang betul-betul sesuai dengan hukum. Ini yang nanti akan kita perjelas,” tutur legislator dapil Sumatera Selatan ini.

Sementara itu, Rektor Universitas Sriwijaya Anis Saggaf berharap bahwa pertemuan para akademisi Unsri ini dengan para Anggota Komisi XI DPR RI ini selanjutnya dapat membantu dalam melakukan perubahan UU BPK, sehingga cita-cita untuk membuat BPK yang kuat dan independen dapat terwujud dengan baik.

“Kita harap kehadiran para pakar ini dapat membantu anggota memperkaya khazanah mereka dalam rangka bekerja melakukan perubahan undang-undang. Kalau dilihat, para pakar ini sangat detail sekali. Jadi ini bagus agar perubahan



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir

Foto: Eitangga/jk

“Dalam pengelolaan keuangan negara ini ada beberapa yang dikuatirkan oleh kepala daerah maupun entitas lembaga yaitu semacam kebijakan atau diskresi yang dilahirkan tanpa melalui proses yang betul-betul sesuai dengan hukum”

nanti lebih baik. Mudah-mudahan nanti ke depan BPK akan sangat baik dan kuat sebagai salah satu lembaga yang mengelola keuangan negara,” ujarnya.

Kunspek ini juga diikuti Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno (F-PDI Perjuangan), I.G.A Rai Wijaya (F-PDI Perjuangan), Marsiaman Saragih (F-PDI Perjuangan), Sumail Abdullah (F-Gerindra), Didi Irawadi Syamsuddin (F-Demokrat), Siti Mufattahah (F-Demokrat), Sukiman (F-PAN), Nur Chayati (F-PKB), Refrizal (F-PKS), Elviana (F-PPP), MZ. Amirul Tamim (F-PPP), dan Lalu Gede Syamsul Mujahidin (F-Hanura). ■ *eps/sf*

Pembahasan RUU Diprioritaskan Sesuai Kebutuhan Masyarakat

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Arif Wibowo mengatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) oleh DPR RI, khususnya Baleg DPR RI tidak selalu berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Karena ada kendala dalam menentukan mana undang-undang yang urgen dan mana yang belum urgen untuk kebutuhan masyarakat.

“Sebenarnya kendalanya itu adalah memutuskan mana yang prioritas yang menjadi masalah mendesak untuk kebutuhan hukum, tidak saja bagi masyarakat, bagi pemerintah, juga bagi negara dan bangsa secara keseluruhan karena semua ini berkesinambungan,” kata Arif saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Baleg ke Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Kamis (18/10).

Untuk itu, tambah legislator PDI-Perjuangan itu, diharapkan nantinya masyarakat sudah sejak awal dapat memberikan masukan pada proses

pembentukan undang-undang, sehingga pada akhirnya setiap RUU yang ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Arif menjelaskan, penyerapan aspirasi masyarakat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas tahun 2019 merupakan hal yang sangat penting bagi Baleg. Baleg menerima banyak masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders) yang ada, jajaran pemerintahan Sumut dan masyarakat.

“Saya kira semua usulan tadi sudah tertampung di daftar rancangan undang-

undang. Kemudian akan kita tetapkan ke dalam Prolegnas tahun 2019. Kita juga tadi menerima banyak masukan yang cukup banyak untuk mempertajam materi substansi,” imbuh Arif.

Arif memastikan, masukan dan aspirasi dari masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumut akan dibawa dalam rapat-rapat di DPR RI. Di sisi lain, legislator dapil Jawa Timur IV itu menanggapi respon masyarakat yang menginginkan DPR RI untuk segera menyelesaikan semua pembahasan RUU.

“Ada banyak undang-undang yang bisa kita selesaikan. Dan undang-undang yang kita bahas ini nantinya kita harap dapat berguna bagi bangsa dan negara. Kita juga tadi menerima masukan bagus terkait undang-undang yang masih tumpang tindih terutama terkait pendidikan,” tutur Arif. ■ jay/mp/sf



Suasana pertemuan Tim Kunker Baleg DPR RI dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR RI Arif Wibowo dengan jajaran Pemprov Sumatera Utara

Foto: Jay/jk



Foto: Singgih/jk

Tim Kunker BURT DPR RI dipimpin Wakil Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso meninjau fasilitas RS Hermina Bogor

BURT Tinjau Program Jamkestama di RS Hermina Bogor

Tim Kunjungan Kerja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI dipimpin Wakil Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso meninjau pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya yang dilaksanakan di Rumah Sakit Hermina Bogor, Jawa Barat.

Agung mengatakan, kunjungan BURT DPR RI ke RS Hermina Bogor untuk memastikan bahwa RS Hermina

Bogor yang menjadi mitra kerja PT. Jasindo selaku asuransi yang meng-cover kesehatan bagi Anggota DPR RI dan keluarganya adalah betul-betul rumah sakit yang representatif.

“Kunjungan kita ke RS Hermina Bogor untuk memastikan bahwa rumah sakit yang menjadi mitra kerja PT. Jasindo adalah betul-betul rumah sakit yang representatif untuk melayani Anggota Dewan beserta keluarganya dan memenuhi standar sebagaimana peraturan dan ketentuan yang ada,”

ungkap Agung di sela-sela meninjau fasilitas RS Hermina Bogor, Jabar, Senin (22/10).

Legislator Partai Demokrat itu menilai bahwa RS Hermina Bogor sudah cukup representatif, cukup baik dan berpengalaman, sehingga sangat tepat jika dijadikan mitra PT. Jasindo dalam menerapkan Program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya.

“Seiring dengan telah berjalannya program Jamkestama tersebut, ternyata ada permasalahan yang harus segera kita selesaikan, seperti perbedaan nama kelas di setiap rumah sakit. Kita berharap ke depan kelas di setiap rumah sakit yang menjadi

mitra PT. Jasindo memiliki nama yang sama, sehingga mempermudah kita mendapatkan pelayanan yang seperti apa,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Agung menyampaikan bahwa untuk pejabat negara, khususnya Anggota DPR RI dan keluarganya bisa mendapatkan kelas tertinggi yang ada di RS yang menjadi mitra PT. Jasindo. Anggota DPR RI sebagai pejabat negara, termasuk keluarganya diberikan pelayanan kesehatan melalui mekanisme asuransi kesehatan melalui PT. Jasindo sebagai pihak pelaksana yang menjalankan program Jamkestama untuk Anggota DPR RI beserta keluarganya.

Tugas yang diemban oleh Anggota DPR RI sangatlah besar, maka jaminan kesehatan bagi Anggota DPR RI menjadi suatu keharusan dan harus dikelola sebaik mungkin,” tutup legislator daerah pemilihan Jawa Barat itu. ■ skr/sf



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meluncurkan buku biografi 'Dari Wartawan ke Senayan' yang dihadiri sejumlah tokoh, rekan dan wartawan senior di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, (25/10).

Foto: Naefuroji | od



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menghadiri 21st Maritime Silk Road International Expo di Guangdong, Tiongkok, yang memamerkan produk-produk Indonesia, Kamis (25/10). Foto: dok | sf



Booth Bagian Humas, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI pada acara Humas Legal Expo 2018 dikunjungi Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly di Graha Pengayoman Kemenkumham, Jakarta, Kamis (25/10). Foto: Andri | od